

Hasil Penelitian

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RUMAH TANGGA UNTUK MENGAKSES LEMBAGA KEUANGAN FORMAL: STUDI KASUS SUSENAS 2015

(DETERMINANT FACTOR FOR HOUSEHOLD TO ACCESS FORMAL FINANCIAL INSTITUTION CASE STUDY: SUSENAS 2015)

Tri Achya Ngasuko

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Gedung Radius Prawiro Lt.6 Komplek Kementerian Keuangan.
Jl Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, 10710
email: ngasuko@gmail.com

Diterima: 10 April 2018; Direvisi: 2 Mei 2018; Disetujui: 14 Mei 2018

ABSTRAK

Bank Dunia pada tahun 2014 melaporkan hanya 36% penduduk Indonesia memiliki akses ke lembaga keuangan formal, angka ini menunjukkan tingkat keuangan inklusif di Indonesia. Masih ada tugas yang harus dilakukan karena pemerintah Indonesia bertujuan meningkatkan tingkat keuangan inklusifnya menjadi 70% pada tahun 2019. Survei BPS, yaitu Susenas 2015, memiliki informasi baru tentang profil tabungan rumah tangga. Informasi ini tidak tersedia dalam survei Susenas sebelumnya. Studi ini adalah yang pertama yang menguji faktor-faktor yang berpengaruh untuk para kepala keluarga mengakses ke layanan keuangan formal, terutama tabungan, berdasarkan Susenas 2015. Hasil penelitian memberikan profil rumah tangga dan faktor yang berpengaruh untuk kepala rumah tangga untuk mengakses lembaga keuangan formal, khususnya tabungan. Analisis data menggunakan model *logit*, diperoleh probabilitas bagi rumah tangga untuk mempunyai tabungan di lembaga formal dipengaruhi secara positif oleh karakteristik demografi seperti usia, jumlah anggota keluarga, tanggungan orang tua kepala keluarga, kepala keluarga laki-laki, pekerjaan formal kepala keluarga, dan kepemilikan kredit para kepala keluarga. Sedangkan banyaknya tanggungan anak-anak, bidang pekerjaan kepala keluarga di sektor pertanian, dan lokasi tempat tinggal di pedesaan berpengaruh negatif terhadap kepemilikan rekening tabungan. Temuan penelitian ini sangat penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan tingkat keuangan inklusif di Indonesia.

Kata kunci: keuangan inklusif, tabungan rumah tangga, Susenas 2015

ABSTRACT

World Bank in 2014 reported only 36% of Indonesians have access to formal financial institutions. This number shows the level of financial inclusion in Indonesia. There is still some task to do since Indonesian government has the goals 70% level of financial inclusion in 2019. The BPS survey, Susenas 2015, has new information on household saving profiles. This information is not available in the previous Susenas survey. This study is the first to examine influencing factors for heads of households accessing formal financial services, particularly savings, based on Susenas 2015. The results of this study provide household profiles and influencing factors for heads of households to access formal financial institutions, especially savings. Using the logit model, the probability for households to have savings in formal institutions is positively influenced by demographic characteristics such as age, number of family members, dependents of family head parents, male family heads, formal employment of heads of households, and credit ownership head of family. While the number of dependents of children, the field of work of the head of the family in the agricultural sector, and location of head of household in rural area negatively affect the ownership of savings accounts. The findings of this research are crucial in providing policy recommendations to improve the level of inclusive finance in Indonesia.

Keywords: financial inclusion, household saving, Susenas 2015

PENDAHULUAN

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa sejak akhir tahun 2010 sampai dengan Februari 2018 telah terjadi peningkatan dana simpanan masyarakat yang terkumpul di lembaga jasa keuangan formal dari sebelumnya 1.969 triliun rupiah menjadi 4.410 triliun rupiah. Dana ini tersimpan di bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berbanding lurus dengan simpanan dana masyarakat, penyaluran kredit juga meningkat dari 1.522 triliun rupiah di akhir 2010 menjadi 4.060 triliun di bulan Februari 2018. Peningkatan yang sangat signifikan ini paling tidak menunjukkan dunia perbankan kita semakin dipercaya sebagai lembaga intermediasi keuangan di tanah air. Namun demikian, ternyata tidak semua lapisan masyarakat memanfaatkan lembaga jasa keuangan formal di bank. Suatu kondisi dimana masyarakat di suatu negara memanfaatkan dan mengakses lembaga jasa keuangan formal sering kita kenal dengan keuangan inklusif.

Survei tentang keuangan inklusif Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Kunt dkk telah melakukan survey pada tahun 2012 dan 2015 di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2015, Indeks Keuangan Inklusif Indonesia hanya 36 persen jauh di bawah Indeks Keuangan Inklusif dunia yang mencapai 62 persen (Kunt dkk, 2015). Namun angka ini sudah lebih baik dari survei sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2012. Pada tahun 2012, hanya 20 persen dari populasi orang dewasa di Indonesia memiliki akses tabungan ke layanan keuangan formal (Kunt dkk, 2012). Dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asean, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, indeks keuangan inklusif Indonesia masih jauh tertinggal dimana secara berturut-turut indeks keuangan inklusif negara tersebut adalah 96, 81, dan 78 persen. Posisi Indonesia hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina yang penduduk dewasanya memiliki akses ke layanan keuangan sebesar 31 persen (World Bank, 2015).

Upaya untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan telah banyak dilakukan oleh Indonesia misalnya dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional untuk Keuangan Inklusif (SNKI) yang ditetapkan pada 1 September 2016. Presiden Joko Widodo telah meluncurkan sebuah gerakan untuk mencapai target keuangan inklusif pada tahun 2019. Presiden Joko Widodo mengharapkan bahwa 75 persen penduduk dewasa Indonesia sudah memiliki akses ke layanan keuangan kepada lembaga keuangan formal. SNKI berfungsi sebagai panduan bagi Menteri dan pemimpin lembaga

dalam membangun kebijakan sektoral yang terkait dengan peningkatan keuangan inklusif. Selain itu, SNKI adalah pedoman bagi gubernur dan bupati/ walikota dalam pembentukan kebijakan lokal terkait dengan peningkatan keuangan inklusif di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Untuk mengkoordinasi dan mensinkronisasikan pelaksanaan SNKI, Peraturan Presiden tersebut menginstruksikan untuk membentuk Dewan Nasional untuk Keuangan Inklusif (DNKI) yang salah satu tugasnya adalah mengarahkan dan membuat kebijakan dalam konteks penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan SNKI. Selain itu, DNKI juga diberi mandat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SNKI.

Dalam rangka mendukung tujuan Presiden Joko Widodo di mana tingkat keuangan inklusif akan mencapai 75% pada tahun 2019, kita perlu mengetahui faktor apa saja yang mungkin berpengaruh dalam pertimbangan masyarakat dalam pemanfaatan layanan jasa keuangan formal, khususnya tabungan. Keuangan inklusif adalah penggerak pertumbuhan ekonomi (Sharma, 2016). Survey yang dilakukan di India dengan menggunakan data periode 2001-2013 menunjukkan bahwa keuangan inklusif, yang ditunjukkan dengan penetrasi perbankan, mempunyai hubungan yang kuat dengan pertumbuhan. Iqbal dan Sami (2017) menambahkan bahwa selain jumlah cabang bank, ternyata rasio simpanan kredit juga berpengaruh signifikan terhadap PDB suatu negara.

Sejalan dengan penelitian diatas, Mordan dan Pontines (2014) berpendapat bahwa peningkatan porsi kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM) membantu stabilitas keuangan, terutama dengan mengurangi kredit macet (NPL) dan kemungkinan gagal bayar oleh lembaga keuangan. Namun demikian, jumlah bank yang banyakpun tidak menjamin level keuangan inklusif. Honohan (2008) menggarisbawahi bahwa keterbukaan akses kepada layanan keuangan formal berperan penting dalam rendahnya tingkat inequality yang ditunjukkan oleh tingkat gini ratio. Park dan Mercado (2015) menambahkan bahwa peraturan tentang pensiun, aturan hukum yang lebih kuat, termasuk penegakan kontrak keuangan dan pengawasan regulasi keuangan, akan memperluas inklusi keuangan, sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang lebih rendah.

Melihat pentingnya suatu keuangan inklusif, banyak peneliti telah mengkaji penyebab tinggi atau rendahnya level keuangan inklusif suatu negara. Wang dan Guan (2017) mengungkapkan bahwa kedalaman sistem keuangan dan status

kesehatan perbankan adalah yang utama faktor yang utama. Faktor lain yang menjelaskan level keuangan inklusif adalah pendapatan, pendidikan dan penggunaan peralatan komunikasi. Zins dan Weill (2016) yang mempelajari keuangan inklusif di 37 negara afrika juga menjelaskan bahwa seorang dengan jenis kelamin pria, lebih kaya, lebih berpendidikan dan lebih tua merupakan faktor yang mendukung keuangan inklusif. Hal ini dikarenakan mereka dengan kriteria tersebut akan cenderung mempunyai pendidikan dan penghasilan yang lebih tinggi. Di sisi lain, kondisi berbeda terjadi dalam peningkatan keuangan inklusif di kalangan penduduk miskin. Menurut Swamy (2014), penyaluran program bantuan sosial melalui bank sebagai wujud peningkatan keuangan inklusif akan lebih berhasil apabila diberikan kepada wanita. Sementara itu, Vibriyanti (2014) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menabung di bank menyatakan bahwa tingkat pendidikan rata-rata anggota keluarga yang berusia produktif bersama dengan total pendapatan rumah tangga selalu signifikan. Temuan yang tak kalah penting lainnya adalah bahwa keluarga dengan kepala keluarga laki-laki cenderung tidak memiliki tabungan daripada rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan.

Inti dari keuangan inklusif adalah ketersediaan lembaga jasa keuangan formal, dalam hal ini bank, sehingga yang tak kalah berpengaruh dalam peningkatan keuangan inklusif adalah ketersediaan bank itu sendiri. Beck dkk (2015) menjelaskan bahwa di Afrika, ketersediaan lembaga jasa keuangan relatif rendah. Maka dari itu, mereka berpendapat bahwa bank-bank asing berkontribusi dalam penyediaan akses keuangan. Namun demikian, *cross border banking* yang akan berkontribusi dalam peningkatan keuangan inklusif adalah bank yang berasal dari negara-negara berkembang, bukan dari negara maju seperti eropa dan amerika. Membangun sistem keuangan yang inklusif merupakan sarana penting bagi sebagian besar negara.

Salah satu indikator dari keuangan inklusif adalah tingkat keikutsertaan masyarakat dalam menabung di lembaga jasa keuangan formal. Terdapat beberapa teori tentang tabungan. Vibriyanti (2014) membuat ringkasan teori tentang tabungan. Yang tertua adalah teori klasik yang muncul sebagai hasil bahwa tabungan dipengaruhi oleh tingkat bunga dan pendapatan, dan pada saat yang sama dipengaruhi secara negatif oleh tingkat konsumsi. Teori tabungan berikutnya adalah hipotesis pendapatan absolut dan hipotesis pendapatan relatif. Hipotesis penghasilan

absolut oleh Keynes menyebutkan bahwa tabungan dipengaruhi secara positif oleh pendapatan seseorang dan dipengaruhi secara negatif oleh tingkat konsumsi. Sedikit berbeda dari hipotesis pendapatan absolut, hipotesis pendapatan relatif meyakinkan kita bahwa tabungan tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan dan konsumsi, tetapi juga tingkat bunga, pendapatan yang diharapkan, tingkat pertumbuhan pendapatan, distribusi pendapatan, dan distribusi usia dalam rumah tangga.

Menurut Vibriyanti (2014) teori penghematan tabungan berikutnya adalah hipotesis pendapatan permanen oleh Milton Friedman. Penghasilan adalah faktor utama yang mempengaruhi tabungan. Tetapi pendapatan dibagi dua, pendapatan tetap dan pendapatan berulang. Hampir semua pendapatan digunakan untuk konsumsi. Orang hanya dapat melakukan penghematan dari pendapatan rutin bulanan, penghasilan yang tidak dapat diprediksi, kenaikan nilai aset, dll. Menurut hipotesis pendapatan tetap, tingkat konsumsi seseorang, pendapatan tingkat pertumbuhan, suku bunga, total aset, selera, tabungan asing, nilai tukar mata uang asing, inflasi, dan rasio keamanan dan penghasilannya menentukan penghematan. Vibriyanti (2014) juga merangkum teori penghematan *rational expectations* dari Mankiw (1997) yang menyatakan bahwa tingkat tabungan yang diambil oleh tidak hanya bergantung pada pendapatan mereka saat ini tetapi juga tergantung pada pendapatan yang diharapkan di masa depan.

Menyimpan adalah penting, terutama untuk keluarga berpenghasilan rendah. Moav dan Neeman (2012) menyatakan bahwa keluarga miskin di seluruh dunia membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka untuk mengkonsumsi barang-barang yang tampaknya tidak mengurangi kemiskinan sambil menghemat dengan harga rendah. Mereka percaya bahwa individu peduli tentang status ekonomi dan menghabiskan lebih banyak konsumsi daripada menabung. Akhirnya, mereka akan terjebak dalam kemiskinan. Jauh sebelum itu, Muradoglu & Taskin (1996) menyatakan terdapat perbedaan perilaku menabung oleh rumah tangga di negara-negara industri dan negara-negara berkembang. Pembentukan pasar keuangan baru dan lebih canggih dan adaptasi instrumen baru sangat penting dalam meningkatkan tingkat tabungan di negara berkembang. Tiga faktor ditemukan sebagai penentu tingkat tabungan yang signifikan di negara-negara ini: rasio ketergantungan, keseimbangan riil, dan pendapatan. Mengadopsi program liberalisasi

keuangan untuk mempromosikan pembangunan akan membantu rumah tangga di negara-negara ini untuk menyalurkan tabungan ke instrumen keuangan dan meningkatkan tingkat tabungan.

Kibet dkk. (2009) juga mempelajari tentang faktor determinan yang mempengaruhi tabungan. Mereka menyatakan bahwa menabung di rumah tangga pedesaan tidak hanya berdasarkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga dipengaruhi secara positif oleh gender dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Di sisi lain, akses kredit, usia, dan rasio ketergantungan secara negatif memengaruhi tabungan rumah tangga. Studi terbaru dari Beckman (2013) mengatakan bahwa keaksaraan secara positif dan signifikan terkait dengan tabungan dan investasi. Cole dkk. (2011) di Beckman (2013) juga melaporkan dua alasan untuk permintaan rumah tangga yang terbatas untuk layanan keuangan di pasar negara berkembang. Yaitu (i) biaya tetap yang terlalu tinggi untuk individu berpenghasilan rendah dan (ii) melek finansial yang terbatas, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Stix (2012) dalam Beckman (2013) juga menyebutkan bahwa hingga 25% rumah tangga yang memiliki tabungan di Rumania lebih suka memegang uang tunai daripada di rekening tabungan, bahkan jika mereka memiliki rekening bank.

Pakistan adalah salah satu negara berkembang. Khan & Hye (2010) mempelajari tentang tingkat simpanan di Pakistan. Mereka menyatakan bahwa liberalisasi keuangan memiliki dampak negatif pada tabungan rumah tangga dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penghematan rumah tangga dalam jangka pendek dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, sektor pertanian, dan pengiriman uang, dalam jangka panjang, terhubung negatif dengan tingkat simpanan riil. Meskipun demikian, rasio ketergantungan juga berdampak negatif terhadap tabungan rumah tangga dalam jangka pendek. Jepang adalah contoh negara-negara berkembang. Iwaisako dkk. (2016) menyatakan bahwa penuaan penduduk di Jepang membuat tren penurunan tabungan tetapi dengan kecepatan yang lancar sehingga pergeseran portofolio mendadak yang terkait dengan guncangan merugikan untuk tabungan rumah tangga tidak mungkin.

Politik juga merupakan salah satu faktor penentu bagi sebuah keluarga untuk menabung. Abergee dkk. (2017) berpendapat bahwa lonjakan ketidakpastian politik menghasilkan peningkatan sementara yang signifikan dalam tabungan di kalangan rumah tangga perkotaan di Cina. Efek risiko terutama diberikan efek di

antara rumah tangga yang lebih tua, lebih kaya, dan lebih diuntungkan secara sosial.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis hasil survei Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015. Susenas 2015 terasa berbeda karena ada bagian baru dari survei terbaru yang isinya tentang akses keuangan. Di bagian itu, ada pertanyaan tentang bagaimana perilaku rumah tangga di Indonesia menyimpan uangnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian survei tersebut memenuhi indikator keuangan inklusif yang ada di Susenas tahun sebelumnya, yaitu, berapa banyak rumah tangga yang sudah memiliki kredit dari bank. Dengan demikian, Susenas 2015 memungkinkan kita untuk melihat faktor yang mempengaruhi kepala keluarga dalam mengakses layanan keuangan formal. Berdasarkan pengetahuan penulis, makalah ini adalah m faktor yang mempengaruhi kepala keluarga dalam mengakses layanan keuangan formal berdasarkan survei Susenas 2015.

Survei World Bank menyatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat simpanan yang rendah di lembaga keuangan formal. Penelitian ini hanya berfokus pada tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga Indonesia pada rekening jasa keuangan formal. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis karakteristik keluarga Indonesia yang memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan formal. Jika Vibriyanti (2014) telah melakukan kajian sejenis menggunakan Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2007, penelitian ini juga mencoba menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku menabung pada tingkat rumah tangga berdasarkan Susenas 2015. Dari penjelasan di atas, pertanyaan penelitian adalah: 1) Bagaimana karakteristik orang yang mempunyai tabungan di Indonesia; dan 2) Variabel yang mempengaruhi sebagian besar rumah tangga untuk memiliki tabungan.

METODE

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Susenas 2015, kami menganalisis faktor penentu bagi rumah tangga untuk mengakses lembaga keuangan formal. Susenas adalah salah satu survei yang dilakukan oleh BPS secara rutin setiap tahun. Susenas mengumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, kesuburan, keluarga berencana, perumahan dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Survei di Susenas 2015 diadakan dua kali dalam setahun, Maret dan September. Pada bulan Maret, pengumpulan data Susenas mencakup 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten / kota di Indonesia yang dicacah menggunakan kuesioner Konsumsi Inti

dan Pengeluaran. Survei Susenas kedua yang dilakukan pada bulan September termasuk 75.000 rumah tangga sampel yang terdaftar adalah tentang Modul Sosial Budaya dan Pendidikan Sosio Budaya (Modul Sosial Budaya dan Pendidikan / MSBP) dan Pengeluaran Pengeluaran (Konsumsi Pengeluaran / KP). Dalam studi ini, kami menggunakan hasil survei kedua, Survei Susenas September.

Dari total 75.000 sampel rumah tangga, kami hanya menggunakan data keluarga yang hanya memiliki uang ekstra untuk disimpan baik di lembaga tabungan keuangan formal atau lembaga keuangan informal. Setelah melalui proses pembersihan data, jumlah responden dalam penelitian ini menurun menjadi hanya 71.568 rumah tangga. Jumlah yang berkurang dari 75.000 hingga hanya 71.568 rumah tangga terutama berasal dari rumah tangga yang tidak memiliki tabungan.

Metodologi yang terinspirasi oleh Vibriyanti (2014) yang mempelajari faktor penentu tabungan rumah tangga menggunakan data IFLS 2007. Dalam penelitian ini, kami tidak menyelidiki semua tabungan rumah tangga melainkan hanya tabungan yang tersimpan di lembaga keuangan formal, dalam hal ini bank. Berbeda dengan Vibriyanti (2014) yang menggunakan data IFLS 2007, kami menggunakan data dari Susenas 2015.

Model pilihan kualitatif diperlukan untuk mengetahui apakah suatu rumah tangga mengakses lembaga keuangan formal yang berarti menentukan peluang bahwa rumah tangga dengan karakteristik tertentu akan memilih suatu pilihan tertentu dari alternatif yang tersedia. Dalam hal ini, pilihan tersebut adalah memilih memanfaatkan layanan keuangan formal atau memilih untuk tidak memanfaatkan layanan keuangan formal. Dalam hal pilihannya hanya ada dua alternatif maka disebut model pilihan biner. Terdapat tiga pilihan ekonometrika untuk menyelesaikan problem tersebut yaitu menggunakan model linear, model probit, dan model logit. Model linear mempunyai beberapa kelemahan yaitu *non-normality* dari *random error*, adanya *heteroskedasticity random error*, dan tidak memenuhi peluang antara 0 sampai dengan 1. Model probit mempunyai kelemahan yaitu bahwa untuk menduga parameter koefisiennya menggunakan *maximum likelihood nonlinear*. Selain itu, interpretasi koefisiennya agak terbatas. Dengan mempertimbangkan kelemahan model linear dan model probit, maka diambil keputusan untuk menggunakan model logit untuk menyelesaikan problem tersebut. Model yang diperkirakan seperti pada persamaan (1):

$$\begin{aligned} \text{Akun_tab} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{umur} + \alpha_2 \text{umur}^2 + \alpha_3 \text{kel} + \alpha_4 \text{pendidikan} + \alpha_5 \text{t_anak} \\ & + \alpha_6 \text{t_ortu} + \alpha_8 \text{jk_kk} + \alpha_9 \text{pek_kk} + \alpha_{10} \text{bid_kk} \\ & + \alpha_{11} \text{kred_kk} + \alpha_{12} \text{lok_kk} + \varepsilon \end{aligned} \quad (1)$$

Dimana:

Akun_tab	= kepala rumah tangga yang memiliki rekening tabungan di bank
umur	= umur kepala rumah tangga
umur ²	= usia kuadrat kepala rumah tangga
kel	= total anggota keluarga yang tinggal di rumah yang sama
pend	= tingkat pendidikan
t_anak	= anggota rumah tangga di bawah 17 tahun atau belum menikah
t_ortu	= orang tua termasuk orang tua mertua yang tinggal di rumah yang sama dengan kepala rumah tangga
jk_kk	= jenis kelamin kepala rumah tangga (1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan)
pek_kk	= kepala bidang pekerjaan rumah tangga (1 untuk formal dan 0 untuk informal)
bid_kk	= kepala bidang pekerjaan rumah tangga (1 untuk pertanian dan 0 untuk non-pertanian)
kred_kk	= status hutang kepala rumah tangga (1 untuk pinjaman dari bank dan 0 karena tidak punya pinjaman dari bank)
lok_kk	= lokasi rumah tangga (1 untuk desa dan 0 untuk perkotaan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik rumah tangga yang memiliki tabungan. Data Susenas tidak memberikan data tentang jumlah tabungan oleh masing-masing penduduk atau rumah tangga di Indonesia. Namun, dari Susenas kita dapat melihat apakah setiap rumah tangga memiliki tabungan atau tidak. Data susenas menunjukkan bahwa terdapat 62,98% rumah tangga yang

mempunyai kemampuan untuk menabung. Jumlah ini setara dengan 42,9 juta rumah tangga di Indonesia pada 2015. Sementara sisanya, 25,2 juta rumah tangga atau sekitar 37,02% sama sekali hidup tanpa kemampuan menyisihkan pendapatan mereka untuk ditabung. Studi ini berfokus pada seberapa banyak rumah tangga yang mempunyai kelebihan uang untuk ditabung akan menggunakan lembaga jasa keuangan

formal, terutama bank, sebagai media penyimpanan atas kelebihan uang tersebut.

Tabel 1 . Karakteristik Kepala Rumah Tangga yang Memiliki Rekening Tabungan

Variabel		Punya Tabungan (%)	Tidak Punya Tabungan (%)
Kelompok Umur	15 – 25	3.96	3.53
	26 – 35	18.41	19.28
	36 – 45	27.47	26.64
	46 – 55	26.46	22.83
	56 – 65	16.25	16.83
	66+	7.46	10.90
	Total	100	100
Kelompok Jumlah Anak	1 – 3	41.82	46.63
	4 – 6	52.52	47.99
	7+	5.66	5.38
	Total	100	100
Kelompok Tingkat Pendidikan	Tidak punya ijazah	8.75	28.73
	Paket A	0.13	0.19
	SD	27.61	41.10
	Paket B	0.15	0.24
	SMP	12.05	13.68
	Paket C	0.48	0.47
	SMA	18.88	8.69
	SMK	11.83	4.81
	D1/D2	1.23	0.20
	D3	3.21	0.29
	D4/ S1	13.98	1.50
	S2	1.62	0.08
	S3	0.08	0.01
Total	100	100	
Tanggungan Orang Tua	Punya Tanggungan	94.05	93.36
	Tidak Punya tanggungan	5.95	6.64
	Total	100	100
Tanggungan Anak-Anak	1 – 3	97.36	96.44
	4 – 6	2.58	3.48
	7+	0.06	0.08
	Total	100	100
Jenis Kelamin Kepala Keluarga	Perempuan	12.74	14.94
	Laki-laki	87.26	85.06
	Total	100	100
Pekerjaan Kepala Keluarga	Non Formal	55.67	75.82
	Formal	44.33	24.18
	Total	100	100
Bidang Pekerjaan Kepala Keluarga	Bidang Non Pertanian	83.57	61.81
	Bidang Pertanian	16.43	38.19
	Total	100	100
Status Kredit Kepala Keluarga	Tidak memiliki hutang	95.91	97.87
	Punya hutang	4.09	2.13
	Total	100	100
Lokasi	Kota	68.43	40.63
	Desa	31.57	59.37
	Total	100	100

Sumber : Susenas 2015 (Data diolah)

Ternyata hanya 23,97 juta rumah tangga dari total 68,15 juta rumah tangga di Indonesia yang memiliki tabungan di lembaga keuangan formal. Angka ini setara dengan 35,18%. Jadi, angka ini lebih kecil dari survei World Bank pada 2015 yang menyatakan bahwa terdapat 36% penduduk Indonesia yang memiliki tabungan di lembaga keuangan formal.

Data Susenas 2015 yang ditampilkan pada Tabel 1 terlihat karakteristik 35,18% rumah tangga yang memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan formal. Rumah tangga dengan tabungan didominasi oleh rumah tangga dengan kepala keluarga 36-55 tahun dan 46-55 tahun, baru kemudian diikuti oleh keluarga dengan rentang usia yang lebih muda yaitu 26-35 tahun. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya dari Vibriyanti (2014) yang menyebutkan bahwa kepala rumah tangga yang lebih muda, yaitu dengan rentang usia 25-34 tahun, akan cenderung memiliki tabungan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam usia yang relatif matang (usia 36-55 tahun) relatif memiliki pekerjaan yang layak sehingga mereka memiliki penghasilan yang cukup sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk menabung. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Wang dan Guan (2017) yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama keuangan inklusif adalah dari adanya pendapatan. Selanjutnya, dalam Vibriyanti (2014) juga menyebutkan bahwa golongan rumah tangga yang tidak menggunakan rekening jasa keuangan formal terjadi pada rumah tangga dengan rentang usia yang lebih tua. Namun demikian, hal ini tidak terjadi dalam penelitian ini, Rumah tangga yang tidak menggunakan layanan jasa keuangan formal tampaknya relatif sama dengan golongan rumah tangga yang memanfaatkan lembaga jasa keuangan formal. Kami menduga bahwa mereka sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menabung akan tetapi secara sukarela memilih untuk tidak memanfaatkan lembaga jasa keuangan formal.

Jumlah anak juga menentukan kepala rumah tangga untuk memiliki tabungan. Sebanyak 52% kepala keluarga dengan jumlah anak banyak (4-6 anak) memiliki rekening keuangan formal. Sedangkan hanya 41% rumah tangga dengan anak sedikit (1-3 anak) yang memiliki rekening keuangan formal. Kondisi yang relatif sama dialami oleh kepala keluarga yang memilih tidak menggunakan rekening keuangan formal. Sekali lagi, kondisi ini bagi penulis merupakan fenomena bahwa beberapa kepala keluarga memilih untuk tidak memanfaatkan rekening keuangan formal secara sukarela. Jika melihat hasil penelitian ini, kondisi ini berkebalikan dari penelitian sebelumnya dari

Vibriyanti (2014) yang menyatakan bahwa justru kepala keluarga dengan sedikit anak (1-3 anak) cenderung mempunyai rekening tabungan dibandingkan dengan kepala keluarga dengan banyak anak (4-6 anak).

Tanpa diduga, orang tua dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah mayoritas kelompok yang menggunakan bank sebagai media penyimpanan uang, diikuti oleh kelas orang tua dengan pendidikan sekolah menengah dan sarjana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara umum, rumah tangga yang memiliki tabungan merupakan rumah tangga dengan kepala keluarga yang lebih terdidik. Yang sedikit mengejutkan adalah fakta bahwa kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti S2 dan S3, ada yang tidak menggunakan tabungan di lembaga jasa keuangan formal sama sekali, meskipun sangat sedikit. Selanjutnya, seperti yang sama-sama kita perkirakan sebelumnya bahwa kelompok yang tidak menggunakan jasa keuangan formal adalah kepala keluarga tidak bersekolah. Namun yang mengejutkan adalah kepala rumah tangga dengan ijazah SD ternyata lebih mendominasi sebagai golongan yang tidak menggunakan jasa keuangan formal. Apabila hasil penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sejenis oleh Vibriyanti (2014), ternyata hasilnya berbeda. Menurut Vibriyanti (2014), level pendidikan tetap berpengaruh secara positif terhadap kepemilikan rekening tabungan. Penulis berpandangan perbedaan ini dikarenakan dalam penelitian ini yang menjadi tolak ukur adalah usia kepala rumah tangga, sedangkan dalam penelitian Vibriyanti(2014), tolak ukurnya adalah pendidikan para anggota keluarga yang produktif.

Tentang kepala keluarga yang masih mempunyai tanggungan, kami membagi dua kategori yaitu tanggungan anggota keluarga muda (<17 tahun) dan tanggungan yang terdiri dari orang tua. Dua golongan ini masih tinggal serumah dengan keluarga inti dan menjadi tanggungan kepala keluarga. Data menunjukkan bahwa kepala keluarga dengan tanggungan kurang dari empat orang anak yang belum menikah cenderung akan memiliki rekening bank dibandingkan dengan orang tua dengan lebih banyak anak. Di sisi lain, keluarga yang tidak mempunyai tanggungan orang tua cenderung mempunyai tabungan atau memanfaatkan layanan keuangan formal. Hal yang relatif sama disimpulkan oleh Vibriyanti (2014) dalam penelitian sebelumnya.

Jenis kelamin kepala rumah tangga juga memberikan pengaruh terhadap kepemilikan tabungan. Kepala rumah tangga laki-laki biasanya termasuk kelompok yang tidak

memiliki tabungan di bank. Selanjutnya, persentase rumah tangga leluhur laki-laki yang tidak memiliki tabungan lebih rendah daripada yang memiliki. Hasil ini sedikit berbeda dengan hasil dari Vibriyanti (2014) yang menyatakan persentase rumah tangga dengan kepala keluarga laki-laki yang tidak memiliki tabungan lebih tinggi daripada rumah tangga yang memilikinya.

Jenis pekerjaan kepala rumah tangga juga berkontribusi pada penelitian ini. Seperti yang sudah kita duga, kepala rumah tangga yang bekerja di sektor formal biasanya memiliki rekening tabungan di bank daripada mereka yang bekerja di sektor informal. Selain itu, kepala rumah tangga yang bekerja di sektor nonpertanian juga memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan jasa tabungan pada lembaga keuangan formal. Selain tabungan, bank sebagai lembaga jasa keuangan formal juga menyediakan layanan kredit. Rumah tangga Indonesia yang tidak memiliki kredit/ pinjaman cenderung tidak membuka rekening tabungan juga. Kondisinya sama dengan rumah tangga tanpa tabungan. Namun, persentase rumah tangga yang tidak memiliki kredit/ pinjaman di rumah tangga yang tidak memiliki tabungan lebih tinggi daripada yang memiliki tabungan. Akhirnya, lokasi rumah tangga juga berdampak pada milik rekening tabungan. Rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan cenderung memiliki rekening tabungan. Mayoritas rumah tangga yang tidak memiliki tabungan berasal dari keluarga yang tinggal di daerah pedesaan.

Faktor yang Mempengaruhi Kepala Rumah Tangga untuk Mengakses Lembaga Keuangan Formal. Dalam model *logit*, kita akan menginterpretasikannya dari koefisien *odds ratio*. Model dengan variabel dependen adalah kepemilikan tabungan, menunjukkan bahwa semua variabel sosio-demografi secara signifikan mempengaruhi kepemilikan tabungan rumah tangga. Namun demikian ada tiga variabel yang berpengaruh secara negatif terhadap kepemilikan jumlah tabungan yaitu banyaknya tanggungan anak-anak, bidang pekerjaan kepala keluarga di sektor pertanian, dan lokasi tempat tinggal di pedesaan berpengaruh negatif terhadap kepemilikan rekening tabungan seperti pada tabel 2. Secara lengkap, faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan rekening tabungan oleh kepala keluarga adalah sebagai berikut;

a. Usia kepala rumah tangga. Koefisien positif berarti sebagai kepala rumah tangga semakin tua, itu akan merangsang mereka untuk membuka rekening tabungan bank. Dari *odds ratio*, kita dapat melihat bahwa peningkatan satu tahun usia kepala rumah tangga akan

memiliki kemungkinan untuk membuka rekening tabungan bank 1,04 kali dibandingkan dengan yang lebih muda. Namun, koefisien kuadrat usia bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, kecenderungan untuk menabung dalam rekening layanan keuangan formal akan menurun. Hal ini berkebalikan dari penelitian Vibriyanti (2014) yang menyatakan bahwa usia kepala rumah tangga berpengaruh negatif terhadap kepemilikan tabungan.

- b. Jumlah anggota keluarga juga mempengaruhi kepemilikan akun di lembaga jasa keuangan formal. Tanda koefisien positif berarti semakin banyak anggota rumah tangga, ada kecenderungan bagi kepala rumah tangga untuk membuka rekening tabungan bank. Angka dari *odds ratio* juga menunjukkan bahwa tambahan satu anggota keluarga memiliki kemungkinan kepala keluarga untuk membuka rekening bank 1,04 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit. Hal ini bertolak belakang dari penelitian Vibriyanti (2014) yang menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif terhadap kepemilikan tabungan.
- c. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Arah koefisien positif berarti tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang lebih tinggi akan meningkatkan kecenderungan kepala rumah tangga untuk membuka rekening bank. *Odds ratio* juga menunjukkan bahwa jika tingkat pendidikan meningkat satu tingkat, itu akan mendorong peningkatan kesempatan untuk membuka rekening bank sebesar 1,2 kali dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Dalam Vibriyanti (2014), menggunakan tingkat pendidikan anggota usia produktif sebagai variabel. Meskipun dalam penelitian ini yang menjadi variabel hanyalah tingkat pendidikan kepala keluarga saja, hasilnya mirip dengan penelitian sebelumnya oleh Vibriyanti (2014) yaitu bahwa tingkat pendidikan anggota rumah tangga yang produktif berpengaruh secara positif terhadap kepemilikan tabungan.
- d. Anggota muda dari keluarga. Koefisien negatif berarti keberadaan anggota keluarga di bawah 17 tahun atau anak-anak yang belum menikah yang masih tinggal di rumah yang sama dengan kepala rumah tangga akan mengurangi kemungkinan kepala keluarga untuk memiliki tabungan di lembaga formal. Dan, kemungkinannya 0,7 kali lebih rendah

dibandingkan dengan kondisi apabila tidak memiliki tanggungan anak. Hal ini berkebalikan dari penelitian Vibriyanti (2014) yang menyatakan bahwa keberadaan anggota muda sebagai tanggungan hidup kepala rumah tangga berpengaruh negatif terhadap kepemilikan tabungan. Sebaliknya, keberadaan orang tua atau mertua yang tinggal dengan anak-anak mereka di masa tua akan meningkatkan kemungkinan kepala

keluarga untuk memiliki tabungan di bank. Kemungkinannya 1,08 lebih tinggi dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang tidak merawat orang tua mereka di rumah mereka. Hal ini sejalan dari penelitian Vibriyanti (2014) yang menyatakan bahwa keberadaan anggota keluarga yang sudah tua sebagai tanggungan hidup kepala rumah tangga berpengaruh positif terhadap kepemilikan tabungan.

Tabel 2 . Hasil dari Regresi Logistik Biner dari variabel sosio-demografi pada Kepemilikan Rekening Tabungan

Kepemilikan Akun Tabungan	Koefisien		Odds Ratio	P>z
Umur Kepala Rumah Tangga	.0396 (0.004)	***	1.0404	0.000
Umur Kepala Rumah Tangga Kuadrat	-.0003 (0.000)	***	.9996	0.000
Jumlah Anggota Keluarga	.0446 (0.006)	***	1.0456	0.000
Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga	.1873 (0.004)	***	1.2060	0.000
Banyaknya Tanggungan Anak	-.3189 (0.040)	***	.7269	0.000
Banyaknya Tanggungan Orang Tua	.0845 (0.035)	**	1.0887	0.016
Jenis Kelamin Kepala Keluarga				
Laki-laki	.0849 (0.024)	***	1.0887	0.000
Perempuan				
Pekerjaan Kepala Keluarga				
Formal	.1714 (0.021)	***	1.1870	0.000
Non Formal				
Bidang Pekerjaan Kepala Keluarga				
Pertanian	-.2563 (0.019)	***	.7738	0.000
Non Pertanian				
Status Kredit Kepala Keluarga				
Punya Hutang	.6033 (0.058)	***	1.8282	0.000
Tidak Punya Hutang				
Lokasi				
Desa	-.3146 (0.019)	***	.7300	0.000
Kota				
Konstan	-1.0352 (0.102)	***		0.000

Jumlah Observasi 71,568 ; Standard errors dalam tanda kurung; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber : Susenas 2015, data diolah

e. Jenis kelamin kepala keluarga. Rumah tangga kepala laki-laki dapat menginduksi membuka rekening tabungan dibandingkan dengan perempuan. Ini menunjukkan dari koefisien regresi yang positif. Juga, peluangnya adalah 1,08 lebih tinggi dari kepala rumah tangga perempuan. Hal ini berkebalikan dari penelitian Vibriyanti (2014) yang menyatakan bahwa keberadaan kepala keluarga perempuan

justru sebagai pendorong kepala keluarga untuk membuka rekening tabungan.
f. Jenis pekerjaan kepala rumah tangga. Jika kepala rumah tangga bekerja sebagai pekerja formal, kemungkinan bagi mereka untuk membuka rekening tabungan lebih baik daripada jika mereka bekerja sebagai pekerja non-formal. Kepala keluarga dengan pekerjaan formal memiliki kesempatan untuk membuka rekening bank 1,18 kali lebih besar daripada kepala

keluarga yang bekerja non-formal. Hal ini sesuai dengan penelitian Vibriyanti (2014). Di sisi lain, sektor lapangan pekerjaan kepala rumah tangga juga menunjukkan alasan pembukaan rekening tabungan bank. Kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian memiliki 0,77 kali lebih kecil membuka rekening tabungan di bank daripada kepala rumah tangga yang bekerja di sektor non-pertanian. Sayangnya, hal ini berkebalikan dari penelitian Vibriyanti (2014).

- g. Kepemilikan kredit dalam rekening keuangan formal juga meningkatkan peluang mereka membuka rekening tabungan bank 1,8 kali lebih besar daripada kepala rumah tangga yang tidak mengambil layanan kredit perbankan sama sekali. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Vibriyanti (2014).
- h. Kepala rumah tangga yang tinggal di daerah pedesaan memiliki 0,73 kali lebih kecil daripada mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Vibriyanti (2014).

KESIMPULAN

Hasil penelitian memberikan profil rumah tangga dan mengidentifikasi faktor bagi rumah tangga untuk mengakses lembaga keuangan formal dalam membuat rekening tabungan. Dengan menggunakan metode model *logit*, probabilitas bagi rumah tangga untuk mendapatkan tabungan di lembaga formal dipengaruhi oleh karakteristik demografi seperti usia, anggota keluarga total, pemuda dan anggota lama yang tergantung dalam rumah tangga. Pendidikan, pekerjaan, dan sektor lapangan kepala rumah tangga, serta status kredit dan lokasi kepala rumah tangga sebagai faktor penentu bagi kepala keluarga untuk membuka rekening tabungan di lembaga keuangan formal.

REKOMENDASI

1. Kebijakan untuk meningkatkan tingkat keuangan inklusif di Indonesia perlu dipertimbangkan penyusunannya.
2. Studi ini merupakan konfirmasi atas studi sebelumnya tentang faktor penentu bagi rumah tangga untuk mengakses lembaga keuangan formal. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya sangat dimungkinkan mengingat penelitian sebelumnya sudah dilakukan sangat lama yaitu pada tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

Aaberge, R., Liu, K., & Zhu, Y. (2017). Political uncertainty and household savings. *Journal of Comparative Economics*, 45(1), 154-170. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2015.12.011>

Badan Pusat Statistik. 2016. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Beck, T., Senbet, L., & Simbanegavi, W. (2015). Financial Inclusion and Innovation in Africa: An Overview. *Journal of African Economies*, 24, i3-i11. <https://doi.org/10.1093/jae/eju031>

Beckmann, E. (2013). Financial Literacy and Household Savings in Romania. *Financial Literacy and Household Savings in Romania*, 6(2), Article 9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5038/1936-4660.6.2.9>

Demirgüç-Kunt, A., & Klapper, L. (2012). Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database. *World Bank Policy Research Working Paper*, 6025(April), 1-61. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9509-7>

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Van Oudheusden, P. (2015). The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World. *World Bank Policy Research Working Paper* 7255. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7255>

Honohan, P. (2008). Cross-country variation in household access to financial services. *Journal of Banking and Finance*, 32(11), 2493-2500. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2008.05.004>

Iqbal, B. A., & Sami, S. (2017). Role of banks in financial inclusion in India. *Papel. Contaduria y Administracion*, 62, 644-656. <https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.01.00>

Iwaisako et. al. (2016). Impact of population aging on household savings and portfolio choice in Japan. *Real Estate Markets, Financial Crisis, and Economic Growth : An Integrated Economic Approach. Working Paper Series* No.61. <http://www.ier.hit-u.ac.jp/hit-refined/wp-content/uploads/2013/12/wp.061.pdf>

Khan, R. E. A., & Hye, Q. M. A. (2010). Financial sector reforms and household savings in Pakistan: An ARDL approach. *African Journal of Business Management*, 4(16), 3447-3456. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2567414

Kibet, L. K., Mutai, B. K., Ouma, D. E., Ouma, S. a, & Owuor, G. (2009). Determinants of household saving : Case study of smallholder farmers , entrepreneurs and teachers in rural areas of Kenya. *Journal of Development and Agricultural Economics*, 1(7), 137-143. Retrieved from <http://www.academicjournals.org/JDAE>

Moav, O., & Neeman, Z. (2012). Saving Rates and Poverty: The Role of Conspicuous Consumption and Human Capital. *Economic Journal*, 122(563), 933–956. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2012.02516.x>

Morgan, Peter and Pontines, Victor, Financial Stability and Financial Inclusion (July 9, 2014). ADBI Working Paper 488. Available at SSRN: <http://scihub.tw/https://ssrn.com/abstract=2464018> or <http://scihub.tw/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2464018>

Muradoglu & Taskin (1996). Differences In Household Savings Behavior: Evidence From Industrial And Developing Countries. *The Developing Economies*, XXXIV-2 (June 1996). https://www.researchgate.net/profile/Gulnur_Muradoglu/publication/229777758_Differences_in_Household_Savings_Behaviour_Evidence_From_Industrial_and_Developing_Countries/links/09e4150d1a777cdf69000000.pdf

Park, C.-Y., & Mercado, R. V. (2015). Financial Inclusion, Poverty and Income Inequality In Developing Asia. ADB Economics Working Paper Series, (426), 17.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

Sharma, D. (2016). Nexus between financial inclusion and economic growth: evidence from the emerging Indian economy. *Journal of Financial Economic Policy*, 8(1), 13–36. <https://doi.org/10.1108/JFEP-01-2015-0004>

Swamy, V. (2014). Financial Inclusion, Gender Dimension, and Economic Impact on Poor Households. *World Development*, 56, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.10.019>

Vibriyanti, D. (2014). The Effect of Socio-Demographic Variables on Household Saving in Indonesia (The Analysis of the 2007 IFLs Data). *Developing Country Studies*. Vol.4, No.1, 2014. ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565 (Online)

Wang, X., & Guan, J. (2017). Financial inclusion: measurement, spatial effects and influencing factors. *Applied Economics*, 49(18), 1751–1762. <https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1226488>

WorldBank (2012). The Little Data Book on Financial Inclusion 12. World Bank Group.

WorldBank (2015). The Little Data Book on Financial Inclusion 15. World Bank Group.

Zins, A., & Weill, L. (2016). The determinants of financial inclusion in Africa. *Review of Development Finance*, 6(1), 46–57. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2016.05.001>.